**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Review**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur *review* yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Dengan adanya literatur *review,* akan memudahkan penulisan karya ilmiah. Disamping itu, hal tersebut juga untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme.

Pertama, jurnal karya Saddam Hussein mahasiswa FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2013 dengan judul “Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global”. Jurnal ini membahas mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi kekuatan Amerika Serikat juga bagaimana Amerika Serikat yang kini dikatakan sebagai negara hegemoni yang didasari oleh beberapa aspek seperti ekonominya yang berkembang pesat yang mampu meninggalkan negara-negara yang dulunya merupakan pesaing dalam bidang ini seperti misalnya Inggris, Jerman dan Jepang. Dalam aspek budaya, yang kini AS telah berhasil menerapkan budayanya yang universal, serta politik luar negeri, dan militer sehingga dapat “mendisiplinkan” atau mengkoordinir perpolitikan internasional agar sesuai dengan kepentingan negaranya.

Kedua, jurnal karya Arifian Adi Winata, program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul “Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan”. Jurnal ini membahas mengenai pasca kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan yang justru semakin terlibat konflik, dimana kedua Negara sama-sama saling menyerang satu sama lain karena kepentingannya masing-masing dimana Sudan sangat berkeinginan untuk memasukan Sudan Selatan menjadi bagian dari negara Sudan, sementara Sudan Selatan yang sangat berkeinginan untuk memisahkan diri dari Sudan. Tidak hanya itu, konflik kedua negara hingga saat ini masih dipicu oleh perebutan minyak di perbatasan antar kedua negara. Kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim bahwa wilayah Heglig merupakan bagian dari masing-masing negaranya. Konflik yang tengah terjadi nyatanya mendapat perhatian dan kecaman dari dunia Barat yang kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB agar menjatuhkan sanksi pada Sudan.

Ketiga, Skripsi karya Shofia Nida, program studi Hubungan Internasional, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2014 dengan judul “Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Selatan Tahun 2011”. Skripsi ini membahas mengenai peran Amerika Serikat yang memberikan respon besar untuk memberikan kepeduliannya terhadap korban perang dengan memberikan dukungan. Meskipun sebagian besar respon Amerika Serikat dilakukan pada akhir perang periode kedua di Sudan, tetapi banyak usaha serta dukungan yang diberikan sejak pemerintahan Presiden G.W. Bush hingga pemerintahan Presiden Obama untuk membantu Sudan Selatan mencapai kemerdekaannya. Bantuan yang diberikan bukan hanya dukungan diplomatik, namun juga dukungan dari sisi ekonomi dan militer. Amerika Serikat yang mengalirkan dana untuk membantu Sudan, Sudan serta Darfur ketika konflik berlangsung hampir US$10 miliar. Hal ini juga dilanjurkan dengan bantuan militer seperti bantuan untuk mendirikan *camp* militer bagi Sudan Selatan serta melatih tentara Sudan Selatan. Dukugan yang diberikan Amerika Serikat pada masa Presiden Bush mencapai puncaknya ketika ditandatanganinya CPA *(Comprehensive Peace Agreement)* oleh kedua Sudan untuk membuat soluasi dari perseteruan kedua Sudan selama ini lewat jalan referendum. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk mendukung kemerdekaan di Sudan Selatan akhirnya membuahkan hasil dengan dilakukannya referendum pada Januari 2011 serta disusul dengan kemerdekaan yang dilakukan pada Juli 2011.

Jika dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Dinamika Konflik di Sudan”, maka literatur review berupa skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya tentu memiliki perbedaan. Hal tersebut terurai dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Penelitian | Isi Penelitian | Perbandingan dengan Penelitian Penulis |
| 1. | Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global | Membahas tentang bagaimana Amerika Serikat pada saat ini menjadi negara adidaya yang didasari oleh beberapa aspek tidak hanya dalam segi kekuatan militer, namun juga ekonominya yang berkembang pesat. | Menganalisa bagaimana arah politik internasional Amerika Serikat berdasarkan sejarahnya, serta kebijakan luar negerinya . |
| 2. | Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan | Membahas tentang latar belakang tentang terjadinya perang saudara yang terjadi antara negara Sudan dan Sudan Selatan yang disebabkan karena beberapa faktor seperti misalnya keputusan Inggris yang saat itu merupakan negara kolonial menginginkan agar Sudan Utara bersatu dengan Sudan Selatan dimana kedua negara tersebut latar belakang yang berbeda terutama dalam hal ras, agama, HAM, dan suku. | Memaparkan lebih dalam mengenai penyebab terjadinya perang saudara yang terjadi hingga mengerucutkan pada kehadiran Amerika Serikat dalam konflik yang tengah ada. |
| 3. | Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Selatan Tahun 2011 | Membahas mengenai bagaimana latar belakang Amerika Serikat dan faktor apa yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk mendukung kemerdekaan tersebut. | Menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberikan dukungannya terhadap Kemerdekaan Sudan pada tahun 2011. |
|  |  |  |  |

Dengan merujuk pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian yang berupa skripsi dan jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada jurnal yang berjudul “Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan” lebih menitikberatkan pada pemicu awal mula terjadinya konflik saudara antara Sudan dan Sudan Selatan terjadi karena perbedaan latar belakang seperti agama yang mendapat perhatian dari PBB.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Selatan Tahun 2011” memfokuskan pada latar belakang Amerika Serikat yang mendukung kemerdekaan Sudan Selatan sementara penulis memiliki dua fokus yaitu tidak hanya pada latar belakang mengapa Amerika pada akhirnya mendukung kemerdekaan Sudan Selatan, namun juga dukungan apa saja yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam mendukung kemerdekaan Sudan Selatan.

Terakhir, penelitian yang berjudul “Eksistensi Amerika Serikat sebagai Kekuatan Global” memfokuskan pada Amerika Serikat yang kini dapat dikatakan sebagai negara hegemoni atau negara yang dapat mendisiplinkan negara lain sesuai dengan kepentingannya. Hegemoni yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang mencengkram dalam beberapa bidang seperti menerapkan budaya yang universal, ekonomi, politik luar negeri dan dalam bidang militer yang pada akhirnya dapat mengkoordinir perpolitikan Internasional dengan cara menguasai beberapa organisasi internasional

**2.2 Kerangka Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang telah dilakukan. Untuk mempermudah penelitian dan dalam rangka memahami dinamika Hubungan Internasional, penulis mengambil dan mengutip beberapa teori dan pendapat dari para ahli Hubungan Internasional. Hubungan Internasional berkaitan erat dengan subyek-subyek seperti diplomasi, organisasi internasional, hukum internasional, dan politik internasional yang pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu kerjasama (*cooperation),* persaingan (*competition),* dan konflik *(conflict)* antar negara satu dengan negara lainnya. Hal tersebut terjadi karena adanya persamaan maupun perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia.

Menurut K.J Holsti dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yang mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai:

**“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungannya diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Pariwisata, Transportasi, Komunikasi serta perkembangan nilai-nilai dan etika Internasional”**(Holsti, 1987)

Hubungan Internasional mempelajari tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isyu-isyu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, dengan sifat, pola, dan jenis hubungan yang masing-masing berbeda. Sebagai fenomena sosial, HI mencangkup aspek yang sangat luas dan kompleks seperti kerjasama dan konflik yang membuat suatu reaksi dan interaksi diantara negara-negara baik yang berkaitan langsung maupun tidak. Kerjasama internasional dilakukan oleh negara-negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat beserta kepentingan negara dengan berpedoman pada politik luar negerinya masing-masing.

Dalam Hubungan Internasional, Politik Internasional menjadi salah satu pokok kajian yang meliputi berbagai bentuk kepentingan dan kekuasaan suatu negara. Menurut K.J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad yani meyatakan bahwa :

**“Politik Internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *Power*, kepentinngan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambakan reaksi dan respon bukan aksi”**(Perwita & Yani, 2005a)**.**

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara tersebut (Dahlan, 1991). Studi Politik Internasional juga berfokus pada pola dan tindakan negara terhadap lingkugan luar yang dapat dikatakan sebagai sebuah sikap aksi-reaksi, respon yang timbul terhadap pandangan negara lainnya. Kajian dalam studi Politik Internasional adalah kepentingan dan unsur *power* didalamnya.

Politik luar negeri adalah bagian dari seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Selain itu, politik luar negeri dianggap sebagai sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian di kancah internasional).

**“Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam peraturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disbut kebijakan luar negeri**.(Perwita & Yani, 2005a).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai kepentingan nasional. Joshua Goldstein mendeskripsikan kebijakan luar negeri sebagai(Goldstein, 1999):

**“...strategi-strategi yang dimbil oleh pemerintah untuk menentukan aksi terhadap peristiwa yang terjadi di Dunia Internasional. *Foreign Policy* adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan tujuan utama memenuhi *national interest* dan meningkatkan Hubungan Internasional dengan negara lain...”**

Sedangkan menurut K.J Holsti, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai (Holsti, 1983) :

**“Kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan untuk mempertahankan tujuan kondisi dan praktek yang berlangsung di lingkungan luarnya (eksternal). Namun kebijakan luar negeri dapat juga dibuat untuk mengubah kondisi di lingkungan luar demi keuntungan mereka sendiri, sebagian besar direncanakan untuk mempromosikan tujuan-tujuan domestik mereka, karena pada dasarnya proses pencarian keamanan, kesejahteraan, otonomi dan hal-hal yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah dari kebutuhan domestik.”**

Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara tidak terlepas dari tuntutan maupun kondisi internal/eksternal yang dimiliki oleh negara tersebut. Berangkat dari tuntutan internal/eksternal yang dimiliki oleh negara tersebut, maka negara akan merumuskan kebijakan luar negeri yang didasari atas kepentingan nasional dengan berorientasi untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan serta keamanan negaranya. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama, di antaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Mas’oed, 1990).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berbeda dengan pembuatan kebijakan dalam negeri atau domestik, di dalam proses pembuatannya lebih memperhatikan beberapa kunci utama yaitu dimana otoritas Presiden lebih besar, pengaruh kongres lebih terbatas dan lebih mengesampingkan masukan dari kelompok kepentingan domestik (Mas’oed, 1990). Selain itu konstitusi Amerika Serikat juga memiliki pengaruh penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, hal ini disebabkan karena di dalam konstitusi mengatur bahwa tujuan utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya atau *national interest* yaitu untuk membangun dan mempertahankan sebuah dunia yang lebih demokratis, aman dan sejahtera untuk kepentingan rakyat Amerika serta masyarakat Internasional (Will, 2007).

Kepentingan nasional-atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'État* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Praktik sejarah yang mengutamakan kepentingan nasional beserta konsekuensinya, dapat ditelusuri melalui kisah hubungan internasional yang bersifat kompetitif dan konfliktual selama berabad-abad, khususnya di Eropa. Seperti Perang Tiga Puluh Taun, perang-perang perimbangan kepentingan nasional, Perang-perang Dunia, Perang Dingin, sampai praktik kolonisasi berbasis merkantilisme (kepentingan ekonomi) ke pelosok-pelosok dunia merupakan wujud kisah pengejaran kepentingan nasional yang agresif (Bainus & Rachman, 2018).

Kepentingan nasional menjadikan *power* sebagai instrumen utamanya. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya Negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara *control* suatu Negara terhadap Negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu Negara untuk bertahan hidup (*Survival*) dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat di jelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu Negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005b). Berdasarkan tinjauan tersebut, para pemimpin negara membuat atau menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.

Menurut Waltz. **“...Kepentingan para penguasa, dan kemudian negara, membuat suatu rangkaian tindakan; kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur; kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang kan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara. Hambatan-hambatan struktural menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali disamping perbedaan-perbedaan dalam diri manusia dan negara-negara yang menggunakannya...”**(Jackson & Sorensen, 2005)

Hans J. Morgenthau mendeskripsikan kepentingan nasional sebagai (Morgenthau, 1985):

**“ Kepentingan nasional terdiri dari dua elemen yaitu didasarkan pada pemenuhan sendiri atau kebutuhan dalam negeri itu sendiri dan yang kedua adalah mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya atau kondisi di luar negaranya”**

Kemudian Miroslav Nincic berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi dasar pembuatan kepentingan nasional (Jemadu, 2008):

**“ pertama, kepentingan tersebut bersifat vital yang dalam pencapaiannya harus menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus melihat dari lingkungan internasional. Dan ketiga, kepentingan tersebut tidak boleh memihak kepada suatu instansi atau organisasi kelompok manapun, namun lebih melihat dari aspirasi bersama.”**

Dalam penelitian ini, Amerika Serikat memberikan dukungan atas kemerdekaan pada Sudan pasca penerapan embargo ekonomi karena kebutuhan sumber daya energi yang merupakan salah satu pendorong. Dalam konsep kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar, yakni: kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Jemadu, 2008 68-69)

Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama (Jemadu, 2008).

Dalam hal ini, Amerika Serikat selaku negara yang memiliki *power* yang cukup besar memiliki pengaruh yang cukup kuat. Hal tersebut dapat dilihat melalui sikap Amerika Serikat selaku negara adidaya yang selalu dapat hadir dalam sebuah peristiwa internasional. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik merupakan sebuah intervensi yang dimaksudkan untuk menjadi fasilitator, mediator, atau pencetus perdamaian. Dalam perannya pada konflik kedua Sudan ini pada saat pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam membantu membuat protokol *Comprehensive Peace Agreement* (CPA). Dukungan tersebut dilakukan untuk mendorong pemberontak Selatan dan pemerintah pusat dalam perang yang panjang agar menandatangani CPA (Gettleman, 2011).

Definisi pengaruh dinyatakan oleh Jack C. Plano dkk dalam bukunya *Kamus Analisa Politik,* bahwa (Plano, n.d.):

**“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau pada tingkah-laku lain yang dapat terlihat. Kemampuan pelaku mempengaruhi orang lain tergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atas dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh dan derajat tuntutan penyesuaian.”**

Keamanan energi merupakan salah satu topik yang sering muncul dalam agenda kebijakan pemerintah negara-negara. Ia juga merupakan alat untuk membingkai isu (*framing*) yang kuat: ia mengkontruksi, menormalisasikan, dan menjadi justifikasi kebijakan-kebijakan tertentu. Upaya menjadikan isu energi menjadi keamanan dapat dilihat dalam sejumlah laporan kebijakan di Amerika Serikat misalnya, hal ini ditunjukan dengan adanya *Energy Independence and Security Act* pada tahun 2007 yang ditandatangani oleh Presiden Bush. Standar bahan bakar dan efisiensi energi suatu bangunan digambarkan sebagai isu keamanan nasional di tengah ketergantungan minyak dan gas Amerika Serikat yang terus meningkat (Bridge, 2015)

Amerika Serikat membutuhkan akses ke sebanyak mungkin sumber minyak bumi di Afrika, yang diperkirakan berjumlah 20% dari total cadangan minyak bumi di dunia. Kehadiran AS pada kepentingan minyak sudah dilakukan sejak 1980-an ketika perusahaan Chevron masih berdiri di Sudan. Kebutuhan AS untuk mencari akses ke sumber minyak bumi di Afrika didorong oleh kenyataan bahwa konsumsi minyak bumi di AS akan meningkat 33,3% dalam 20 tahun ke depan, dan pada tahun 2020 2/3 dari kebutuhan minyak bumi AS akan diimpor (“Kepentingan AmeriKa Serikat di Sudan,” n.d.) Amerika Serikat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sumber minyak bumi di kawasan Afrika termasuk Sudan, karena dianggap sebagai daerah yang memiliki potensial untuk sumber minyak bumi AS dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah. Dalam kaitannya dengan kasus ini, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki ekonomi yang kuat berusaha membuat kebijakan luar negeri dengan memberikan bantuan ekonomi untuk krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

Sementara konflik dalam hubungan internasional merupakan masalah yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Konflik sosial menurut Kriesberg (1993) merupakan hubungan antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan berbeda sehingga tidak pernah rukun (Research, 1993).

Peter Wallensteen dalam Jemadu (Wallensteen, 2002) dengan bukunya berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System* menyebutkan tiga tipe konflik internasional yaitu: 1) konflik antar negara (*interstate conflict*) 2) konflik internal (*internal conflict*) 3) konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*)

Dalam kasus ini, konflik yang terjadi di Sudan merupakan konflik internal yang telah berlangsung sejak Inggris yang merupakan negara kolonial pada saat itu memberikan status merdeka yang kemudian terjadi pengelompokan antara Sudan bagian Utara dan Sudan bagian Selatan yang memiliki latar belakang berbeda baik dari segi ras, agama, budaya, dan masyarakat Sudan Selatan yang tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan juga dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan politik lainnya. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu awal dimulainya pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan dilanda konflik berkepanjangan.

Konflik saudara yang terjadi antara Sudan bagian Utara dan Sudan bagian Selatan merupakan konflik yang timbul akibat dari benturan budaya, kepentingan yang sama, dan idealisme dari masing-masing pihak untuk saling mendominasi satu sama lain baik dalam kehidupan sosial masyarakat atau bahkan dalam institusi pemerintahan, sehingga memunculkan sebuah kompetisi yang berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik. Dalam fenomena yang terjadi di Sudan, konflik yang terjadi antara kedua negara Sudan bagian Utara dan bagian Selatan dapat digolongkan sebagai konflik etnis.

Sebuah teori yang diungkapkan oleh Ted Robert Gurr (Chester A. Crorker, Hampson, & Aal, 2001) menyatakan:

**“bahwa konflik etnis merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan diri mereka dalam kebangsaan atau etnis tertentu baik berdasarkan suku, agama, bahasa, dan ras, dimana mereka membuat klaim atas kepentingan kelompok berupa tuntutan materi dan politik serta klaim yang timbul dari masalah budaya dan agama. Mereka kemudian memposisikan diri sebagai oposisi yang mengekspresikan diri terhadap negara atau aktor-aktor politik lainnya.”**

Kelompok-kelompok yang bertikai dalam suatu negara dapat berakibat pada memburuknya stabilitas keamanan bagi negara tetangganya dan dapat memiliki dimensi internasional. Kemudian di lain pihak juga dapat mengundang campur tangan asing dalam konflik yang tengah terjadi. Etnisitas menjadi salah satu kekuatan yang membentuk sistem internasional pasca Perang Dingin, bahkan menempati arti penting dalam politik luar negeri banyak negara, termasuk negara-negara besar. Isu nasionalisme etnis semakin populer dengan munculnya berbagai isu lain yang berkaitan dengannya, seperti semakin digemarinya ide negara kecil, intervensi kemanusiaan, penyelesaian konflik dan hak azasi manusia (Wardhani, n.d.).

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Sudan nyatanya mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta anggotanya termasuk Amerika Serikat. Embargo Ekonomi serta sanksi dan pengecaman oleh Amerika Serikat terhadap Sudan yang pada saat itu dianggap sebagai negara sponsor teroris pada akhirnya dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan dengan menjanjikan kebijakan hubungan normalisasi hubungan Amerika dengan Sudan serta mencabut Sudan sebagai negara sponsor terorisme. Kebijakan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik di Sudan nyatanya bahwa fakta Sudan yang merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki sumber minyak bumi.

**2.3 Skema Definisi Operasional**

SUDAN

AMERIKA SERIKAT

AGENDA GLOBAL

MEKANISME

PENYELESAIAN

STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI AS

REKONSILIASI

SIKAP – TINDAKAN POLITIK LUAR NEGERI AS

**KONFLIK**

* ETNIS
* SEKTARIAN

OTORITAS SIPIL

PARTISIPASI POLITIK

**SUDAN SELATAN**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori-teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

**“jika sikap dan tindakan Amerika Serikat baik secara persuasif dan koersif merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka mekanisme ke arah rekonsiliasi, supremasi sipil serta partisipasi politik secara demokratis menjadi bagian dalam proses penyelesaian konflik di Sudan”.**

1. **Operasionalisasi Tabel Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)**

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Tabel Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

**Tabel 2.2: Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  Jika sikap dan tindakan strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Sudan | 1. Sikap dan tindakan persuasif kebijakan luar negeri AS 2. Sikap dan tindakan koesif kebijakan luar negeri AS | 1. AS memainkan peran kunci dalam membantu membuat protokol yang mengantarkan konflik dua Sudan pada CPA.  Sumber : <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/171718.htm>  1. PBB mengeluarkan Resolusi 1564 yang didukung dan dijatuhkan oleh AS terhadap Sudan tentang pemberian sanksi ekonomi pada pemerintah Khartoum jika tidak mau bekerja sama.  Sumber : Christin Viesta Nonitehe “Latar Belakang merdekanya Sudan Selatan Dalam Referendum 2011 Serta Tinjauan Mengenai Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum”, *Research Paper,* FISIP UI, 2013.   1. Dalam memerangi terorisme yang ada di Sudan, Amerika Serikat memberikan sanksi dan pengecaman untuk Sudan sebagai negara sponsor terorisme   Sumber : Gerard Prunier “Darfur: The Ambigous Genocide”, London: C. Hurst&co 2005 (52-53)   1. Amerika Serikat mendakwa Presiden Sudan, Omar Al-Bashir atas dugaan penjahat perang.   Sumber : Council Of American Ambassador, “The United State of South Sudan”,  :https://www.americanambassadors.org/publications/ambassadors-review/fall-2013/the-united-states-and-south-sudan-a-relationship-under-pressure%0D.   1. Pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Sudan karena Sudan dinyatakan sebagai negara sponsor terorisme.   Sumber : Princeton N. Lyman “*Negotiating Peace in Sudan*”, Journal of The School of Global Affairs and Public Policy (GAPP) |
| **Variabel Terikat :** Maka mekanisme proses penyelesaian konflik di Sudan | 1. Rekonsiliasi konflik di Sudan | 1. Perjanjian Addis Ababa yang dinegosiasikan antara Gos dan SPLM/A yang berisikan penghentian perang dan kewenangan bagi wilayah selatan untuk mendirikan pemerintahannya sendiri.   Sumber : Douglas Hamilton Johnson, “*The Root Causes of Sudan’s Civil Wars: Peace or Truce”,* Fountain Publisher, 2011.  2. Pertemuan oleh kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan di Sudan yang dilakukan oleh John Garang selaku pemimpin SPLM/A dan Ali Osman Taha selaku wakil presiden Sudan.  Sumber: Arif Setyanto, “Faktor Penyebab Konflik Pasca Partisi Sudan-Sudan Selatan Tahun 2011-2013”, *research paper* Universitas Airlangga.  3. Penandatanganan CPA (*Comprehensive Peace Agreement*) dilakukan oleh pemerintah Sudan dan pemimpin SPLM.  Sumber:  <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war2.htm> |
|  | 1. Otoritas pemerintahan sipil di Sudan | 1. Setelah mengudeta Presiden Nimeiry dan memimpin dewan transisi militer, Swar Al-Dahab menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.  Sumber : Pascal S bin Saju, dalam terbitan Koran Kompas, April 2019. |
|  | 1. Partisipasi politik dalam proses penyelesaian konflik di Sudan | 1. Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Sudan Selatan pada pemerintah di Khartoum untuk mendapatkan otonomi yang signifikan.  Sumber : Tim Youngs, “Sudan: conflict in Darfur”, research paper 04/51, *House of Commons Library,* 23 Juni 2004,7.  2. Pemberontakan yang dilakukan oleh suku Afrika Darfur terhadap pemerintah Sudan. Sumber : <https://www.britannica.com/topic/Janjaweed>  3. Demonstrasi massal dan pemogokan umum yang mendorong militer Sudan untuk menggulingkan Presiden Gafaar Nimeiry  Sumber : <https://www.nytimes.com/2009/06/12/world/africa/12nimeiry.html> |